

## KEUNGGULAN DAN KEKUATAN SISTEM EKONOMI PANCASILA

<sup>1</sup>Mokhammad Fazar, <sup>2</sup>Nizma Zaqlulsyah, <sup>3</sup>Nur Islamiya, <sup>4</sup>Maulidyah Qurrotul  
A'yuni, <sup>5</sup>Rully Maulidyah Andriana, <sup>6</sup>Ani Faujiah  
STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

<sup>1</sup>[mokhammadfazar77@gmail.com](mailto:mokhammadfazar77@gmail.com), <sup>2</sup>[nizma11zaq@gmail.com](mailto:nizma11zaq@gmail.com),

<sup>3</sup>[n.islamiyah74@gmail.com](mailto:n.islamiyah74@gmail.com), <sup>4</sup>[maulidyahqurrotul@gmail.com](mailto:maulidyahqurrotul@gmail.com),

<sup>5</sup>[rullymaulidya07@gmail.com](mailto:rullymaulidya07@gmail.com), <sup>6</sup>[anifaujiah99@gmail.com](mailto:anifaujiah99@gmail.com)

**Abstract:** The advantages of the basic principles contained in the Pancasila economic system are equally related to the principles of humanity, economic nationalism, economic democracy which are embodied in a people's economy and justice. Of course, the concept of Pancasila economics itself is not just a practical theory in economic behavior, but is a discipline of economics with principles to allocate scarce and limited resources to be used rationally so as to achieve maximum results for the welfare of all Indonesian people. Pancasila economy is a joint effort based on the principle of national cooperation, which can also aim to realize social justice in shared prosperity and prosperity.

Keywords: Superiority, Pancasila Economic System

**Abstrak:** Prinsip dasar yang terkandung dalam sistem ekonomi pancasila sama-sama berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan kedalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Tentunya, konsep ekonomi pancasila itu sendiri bukan hanya sekedar teori praktis belaka dalam perilaku ekonomi, tetapi merupakan suatu disiplin ilmu ekonomi berprinsip guna melakukan alokasi sumber daya yang langka dan terbatas untuk dimanfaatkan secara rasional sehingga mencapai hasil yang maksimal bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi pancasila merupakan usaha bersama yang berasaskan kegotong-royongan nasional pun dapat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Keywords: Keunggulan, Ekonomi Pancasila

## **Pendahuluan**

Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam jenis karakteristik dan berbagai pandangan hidup yang sama bedanya dengan bangsa - bangsa lain. Karena di setiap bangsa yang ada di dunia ini selalu memiliki pandangan hidup, falsafah hidup, dan aturan hidup masing-masing dalam masyarakat, bangsa, dan negara tempat tinggalnya, agar tidak terjerumus kedalam kekacauan dalam pergaulan nasional maupun internasional. Komunisme dari adanya nasional dan liberalisme mendasarkan filosofi nasionalnya pada konsep ideologi tertentu, seperti contoh komunisme membangun ideologinya di atas konsep ideologi menurut Karl Marx.<sup>1</sup>

Berbeda halnya pandangan dengan bangsa lain, Bangsa Indonesia justru pandangan hidupnya mendasarkan kepada etika bermasyarakat, bernegara serta berbangsa pada prinsip-prinsip budaya yang sudah dimiliki oleh Bangsa Indonesia dan melekat terhadap budayanya sendiri. Sehingga nilai - nilai dari dasar negara serta masyarakat yang melekat kedalam sila bukan hanya berasal dari konsep seseorang. Melainkan itu adalah karya dari Bangsa Indonesia yang digali dari nilai - nilai budaya Bangsa Indonesia itu sendiri, dan telah melalui berbagai macam proses dari refleksi filosofis menurut para founding fathers yaitu Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Soepomo dan pendiri bangsa yang lain. Dalam filsafat, Bangsa Indonesia sendiri sebelum berdirinya suatu bangsa merupakan suatu bangsa yang berpegang teguh kepada ketuhanan dan kemanusiaan.

Hal inilah yang mendasari pada fakta objektif terhadap manusia yaitu ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Pancasila itu sendiri merupakan sebuah dasar dari falsafah nasional dan falsafah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sudah menjadi suatu keharusan moral dalam proses mencapainya secara konsisten termasuk kedalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara serta berbangsa.

Atas dasar mengenai pengertian filosofis tersebut itulah dapat diketahui bahwa didalam kehidupan bernegara nilai - nilai dari Pancasila itu sendirilah yang menjadi filsafat atau pedoman negara. Akibatnya yang terkandung kedalam setiap aspek penyelenggara negara memang harus berasal dari adanya nilai - nilai Pancasila, yang tertuang dalam suatu sistem dari peraturan perundang - undangan yang berlaku di negara Indonesia. Dengan kata lain, didalam realisasinya kenegaraan tersebut termasuk kedalam suatu proses reformasi dewasa, yang merupakan suatu kewajiban, keharusan serta keikutsertaan bahwa Pancasila diukur sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan suatu kenegaraan, baik berupa dalam pembangunan nasional

---

<sup>1</sup> Muhammad Hatta, *Politik Kebangsaan dan Ekonomi*, [Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2015], 393.

seperti, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial budaya, bidang pertahanan, bidang keamanan serta tidak ketinggalan bidang ekonomi.<sup>2</sup>

Bermula dari pertanyaan tersebut, kami mulai tertarik untuk mengkaji beberapa hal konsep mengenai sistem ekonomi Pancasila. *Pancasilanomics* ( *Ekonomi Pancasila* ) dapat diartikan sebagai strategi penyesuaian kehidupan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi global Covid - 19. Karena dalam resesi ekonomi selama pandemi berlangsung, PHK besar-besaran dilakukan. Hal ini dapat terjadi mengingat karena peran pemerintah sendiri dianggap tidak tegas dalam mengeluarkan suatu kebijakan - kebijakan prioritas di masa pandemi saat ini sedang berlangsung. Permintaan tersebut itulah dapat mengakibatkan menurun dan akhirnya dapat menyebabkan intensitas produksi yang lebih rendah untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Rugi atau bahkan kebangkrutan tidak bisa dihindarkan, sehingga perlu dilakukan kajian terhadap reposisi ideologi ekonomi. Pandemi Covid - 19 yang saat ini melanda hampir diseluruh negara di dunia ini pun dapat membuka bagaimana cara berpikir kita dengan sistem ekonomi lain yang sedang beroperasi di dalam suatu negara, contohnya Indonesia.

Sistem perekonomian di Indonesia sejak awal atau dini memang dikenal tidak mandiri, dikarenakan tidak adanya struktur yang mapan, sehingga lambat laun dapat membentuk sifat menggantungkan atau kecanduan diantara sistem pemerintah pusat atau kota dengan sistem pemerintah daerah atau kabupaten. Hal tersebut dikarenakan didalam sistem perekonomian yang kurang didasarkan pada integritas mandiri, terutama sebagai sistem ekonomi kapitalis periferallah yang telah menggabungkan kapitalisme kolonial dengan struktur feodal regional. Untuk begitu, prinsip-prinsip terhadap sistem ekonomi Pancasila telah diterapkan secara konsisten dan optimal mulai dari kebijakan dan implementasi. Sehingga Kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid - 19 yang tidak saja terfokus terhadap perusahaan besar saja, melainkan pada kelompok berpenghasilan minim sampai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sekaligus bertujuan untuk memprediksi kondisi ketimpangan antar individu dan wilayah yang semakin melebar akibat pandemi. Pemerintah juga telah memberikan berbagai macam alokasi sumber daya yang dibutuhkan, dukungan dan kemudahan bagi pelaku usaha.

Salah satunya dengan menyediakan saluran pembiayaan bagi peserta UMKM dalam bentuk Kredit Komersial Rakyat (KUR), dengan tingkat bunga 6% bahkan 3% pada tahun 2021. Sebelumnya, peserta komersial yang menerima tingkat bunga rendah 6-8% hanya cocok bagi beberapa perusahaan besar saja. Kebijakan reformasi permodalan ini juga diharapkan dapat

---

<sup>2</sup> Kaelan, Pendidikan Pancasila, [Yogyakarta: Paradigma, 2014], 4 - 5.

mampu untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan aset dan akses usaha, sehingga dapat tercapai tujuan akhir yaitu menciptakan lapangan kerja yang layak bagi seluruh kehidupan manusia dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja dalam lingkungan yang sejahtera dan mandiri. Dan mencapai keadilan dan kemakmuran secara merata. Untuk itu, pemerintah terus beradaptasi dengan pandemi dan dampaknya yang sangat luar biasa inilah, serta harus mengambil langkah-langkah konkrit. Namun, secara fundamental, solusi kebijakan yang diambil tetap mengacu atau didasarkan pada prinsip Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam konteks transformasi struktural ekonomi yang sedang berlangsung.<sup>3</sup>

## **Tinjauan Teoritis**

### **Pengertian Keunggulan dan Pancasila**

Definisi Keunggulan adalah suatu kelebihan atau ciri khas dari apa yang kita miliki terhadap mereka yang tidak memiliki.

Definisi dari Pancasila terdapat didalam perpustakaan Buddha di India yang berasal dari kitab suci Tri Pitaka yang terdiri dari berbagai macam buku besar Suttha Pitaka, Abidhama dan Vinaya Pitaka.

Masuknya kebudayaan India kedalam Indonesia telah melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha, maka ajaran pancasila Buddhis pun masuk kedalam perpustakaan Jawa, apalagi pada zaman Majapahit. Definisi tersebut, dalam khasanah kesusastraan nenek moyang Bangsa Indonesia di zaman keemasan kerajaan Majapahit, dibawah raja Hayam Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negarakertagama, yang berupa kakawin dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365.

Pada tanggal 1 Juni 1945 telah berlangsung proses perumusan Pancasila. Berawal dalam sidang BPUKI pertama, yang diketuai oleh Radjiman Widyodiningrat. Dalam sidang tersebut membahas tentang rumusan yang nantinya akan menjadi dasar negara Indonesia, kemudian tampilah tiga orang sebagai pembicara, diantaranya yaitu : Mohammad Yamin, Soepomo dan Ir. Soekarno. Dalam pidatonya Ir. Soekarno secara lisan dan tegas menyampaikan usulan lima asas yang nantinya akan ditunjuk sebagai dasar negara Indonesia, yang rumusannya sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pinus>  
**The 2<sup>nd</sup> ICO EDUSHA 2021**  
**Vol. 2.No.1 December 2021**  
**E-ISSN. 2775-930X**

- 1) Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia,
- 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan,
- 3) Mufakat atau Demokrasi,
- 4) Kesejahteraan Sosial, dan
- 5) Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Selanjutnya, Ir. Soekarno meringkas lima asas tersebut menjadi Tri Sila yang rumusnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Sosio Nasional yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme,
- 2) Sosio Demokrasi yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat, dan
- 3) Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun Tri Sila tersebut masih diperas lagi menjadi Eka Sila atau Satu Sila yang intinya adalah gotong-royong.

Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alenia, telah tercantum rumusan pancasila yang benar sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- 3) Persatuan Indonesia,
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakililan, dan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, inilah yang secara konstitusional secara sah dan benar telah ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dan telah disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sejarah telah membuktikan adanya bahwa ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu upaya Bangsa Indonesia dalam mempertahankan Proklamasi dan eksistensi negara dan Bangsa Indonesia.

Berbagai macam rumusan Pancasila tersebut yang telah sah adalah rumusan Pancasila yang sudah diakui oleh konstitusional, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan salah satu unsur dari empat pilar berbangsa dan bernegara. Diantara empat pilar tersebut adalah Undang-undang Dasar 1945, Pancasila, Binneka Tinggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

## **Metode**

Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori - teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.<sup>5</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sistem Ekonomi Pancasila**

Sistem Ekonomi Pancasila memuat tentang berbagai macam ketentuan atau peraturan perilaku ekonomi yang tertuju terhadap pedoman Bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Didalam Sistem Ekonomi Pancasila pemerintah beserta masyarakat Indonesia harus memihak terhadap kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujudnya pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>6</sup>

Ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau istilah lain ekonomi pasar terkendali.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sukarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Jakarta, Media Prassendo, 2016. Sulastomo, "Cita-cita Negara Pancasila", Jakarta, PT. KOMPAS Media Nusantara, 2014.

<sup>5</sup> V.Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.57..

<sup>6</sup> Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1987), Cet. Ke-2, 122

<sup>7</sup> Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 28.

Menurut pandangan Sri-Edi Swasono juga mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu merupakan suatu ekonomi sosialis yang berakar pada adat-istiadat Indonesia (kolektivisme) dan tuntutan perjuangan bangsa, yang berorientasi pada kelima sila Pancasila itu sendiri. Dan di dalam bukunya Gunawan Sumodiningrat yang berjudul sistem ekonomi Pancasila dalam perspektif, beliau juga mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu adalah pandangan filsafat di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini.<sup>8</sup>

Sumber lain mengenai Sistem Ekonomi Indonesia ini juga mengarah terhadap nilai - nilai Pancasila yakni sebagai pedoman Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu dari nilai intrinsiknya yaitu Ekonomi Pancasila sendiri memiliki nilai - nilai dasar diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Ketuhanan, maksudnya dimana dalam roda perekonomian bangsa itu digerakkan melalui rangsangan ekonomi, sosial serta moral yang berlaku.

2. Kemanusiaan, yaitu pemerataan tingkat sosial, serta adanya kehendak yang kuat dari masyarakat dalam mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, serta tidak membiarkan terjadinya suatu ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

3. Kepentingan nasional (nasionalisme ekonomi), juga termasuk didalam era globalisasi, sehingga semakin jelas urgensi dapat terwujudnya perekonomian nasional yang berpondasikan kuat dan mandiri.

4. Kepentingan rakyat banyak, juga menjadi salah satu dari bentuk demokrasi ekonomi yang berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan, contohnya koperasi dan usaha - usaha kooperatif yang menjiwai perilaku ekonomi individu serta kolektif.

5. Keadilan sosial, maksudnya yaitu berkeseimbangan yang harmonis, efisien serta adil antara perencanaan nasional, desentralisasi ekonomi, otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>9</sup>

### **Pandangan dari Para Tokoh**

---

<sup>8</sup> Swasono Sri-Edi, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1987. Wahid Abdurrahman, "Islamku, Islam Anda, Islam Kita", Jakarta, Proyek Demokrasi, 2011.

<sup>9</sup> <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id./my%20Web/sembul//59.htm>

Sejak tahun 1980 an, istilah Ekonomi Pancasila identik dengan tokoh yang bernama Mubyarto. Beliau menegaskan bahwa Ekonomi Pancasila harus berkaitan secara langsung dengan ekonomi masyarakat kecil yang berpangku terhadap moralitas sosial, egalitarianisme, nasionalisme ekonomi, koperasi dan keseimbangan antara perencanaan pusat dan daerah.<sup>10</sup>

Perbedaan antara pendapat Ekonomi Pancasila versi Mubyarto dengan Dr. Emil Salim terletak pada definisi Ekonomi Pancasila yang dipakai pada awal dekade pada tahun 1965 sampai tahun 1980 an. Jika pada awalnya, definisi Ekonomi Pancasila dikeluarkan sebagai dasar legitimasi bagi jalannya ekonomi yang kemudian ditempuh oleh Orde Baru, maka ditangan Mubyarto beserta rekannya, Ekonomi Pancasila pada tahun 1980 an justru dapat dijadikan sebagai suatu senjata dalam mengkritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Didalamnya terdapat tiga hal yang membuat rezim Orde Baru bereaksi serius terhadap pendapat Ekonomi Pancasila, yakni sebagai berikut :

- a. Ekonomi Pancasila secara politis telah dijelaskan sebagai suatu kritik terhadap jalannya pembangunan ekonomi yang sedang direalisasikan oleh pemerintah, sehingga tentu saja kritik tersebut tidak mendapat respon setuju.
- b. Sejak tahun 1978 pemerintah Orde Baru memulai usaha untuk memonopoli dan mengkonsolidasi produksi tafsir atas Pancasila.
- c. Penggunaan label Pancasila sendiri dalam istilah Ekonomi Pancasila dari sudut pandang pemerintah sepertinya telah mendatangkan sebuah trauma. Jika kita kembali pada tahun 1966, pemerintah akan menjadikan Pancasila sebagai alat untuk mendelegitimasi rezim Soekarno, kemudian tiba saatnya pada awal tahun 1980 an, sekelompok ekonom menggunakan label tersebut sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan - kebijakan pemerintah.

Menurut pendapat Gunawan Sumodiningrat, definisi dari Ekonomi Pancasila sendiri sebagai bentuk perjuangan, contohnya perjuangan untuk mewujudkan cita - cita kemerdekaan Bangsa Indonesia sehingga tercapai sampai benar - benar merdeka, bersatu membentuk persatuan yang berdaulat adil dan makmur. Menurut pendapatnya, Ekonomi Pancasila, sejalan lurus dengan perjuangan dan pengorbanan kedaulatan politik, sehingga menetapkan pembangunan ekonomi nasional melalui hasil dari perjuangan terhadap kedaulatan ekonomi. Gunawan Sumodiningrat menyatakan bahwa Ekonomi Pancasila

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: Projeck Demokrasi, 2011), 183.



bukan hanya untuk perjuangan bangsa saja, melainkan juga sebagai pandangan filsafat dalam kehidupan sehari - hari. Sistem Ekonomi yang dipengaruhi atas diterimanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Namun bagi Mubyarto, ekonomi pancasila mendefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi yang berpedoman pada Pancasila, yakni sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan ketogotong - royongan nasional, bukan hanya kegotong - royongan di pedesaan, di kampung, melainkan kegotong - royongan pada tingkat nasional yang nantinya dapat mendukung persatuan bangsa.<sup>11</sup>

### **Kekuatan Dan Keunggulan Sistem Ekonomi Pancasila**

Biasanya didalam Sistem Ekonomi Pancasila itu dengan mengutamakan unsur kolektivitas dan kekeluargaan dalam menjalankan perekonomian. Tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dalam system ekonomi ini. Kekuatan adalah faktor yang membantu menentukan daya saing lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi.<sup>12</sup>

Kelebihan adalah sesuatu yang menonjol dari system ekonomi tersebut sedangkan kekurangan adalah sesuatu yang kurang atau tidak dimiliki oleh system ekonomi tersebut. Berikut uraian dari kekurangan dan kelebihan system ekonomi pancasila tersebut.

#### 1.) Kelebihan Sistem Ekonomi Pancasila

Adapun beberapa kelebihan system ekonomi pancasila, yaitu :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- b. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- d. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- e. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh Negara.
- f. Sumber- sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan pemuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.

---

<sup>11</sup> Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1998), 32-33.

<sup>12</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/sistem-ekonomi-pancasila.html>

g. Hak milik perorangan biasanya diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

h. Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara.

## 2.) Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila

Selain memiliki kelebihan, system ekonomi ini juga memiliki kekurangan yaitu :

a. System “ Free Fight Liberalism” yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain.

b. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

c. System “Etatism” Negara sangat dominan serta mematikan potensi daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.

## Kesimpulan

Dari berbagai macam Konsep ekonomi pancasila bahwa dapat kita simpulkan mengenai sistem ekonomi yang berlandaskan terhadap pedoman bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai suatu usaha bersama yang berasaskan kegotong - royongan nasional pun yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial didalam kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bersama. Hal ini juga yang termasuk kedalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ”. Selain itu, Sistem Ekonomi Pancasila ini mempunyai tujuan utama dari terbentuknya berbagai macam konsep Ekonomi Pancasila. Selain itu, konsep dari Ekonomi Pancasila ialah sistem ekonomi yang dibangun dari nilai - nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Beberapa prinsip mendasar yang terkandung kedalam Sistem Ekonomi Pancasila sama - sama berhubungan mengenai prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang dapat diwujudkan kedalam beni ekonomi kerakyatan serta keadilan. Tentunya, konsep mengenai Ekonomi Pancasila itu sendiri bukan hanya sekedar teori praktis belaka saja dalam perilaku ekonomi, melainkan merupakan suatu awal disiplin ilmu ekonomi yang berprinsip dalam melakukan alokasi sumber daya yang langka dan terbatas untuk dimanfaatkan secara rasional sehingga mencapai hasil yang maksimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

## **Rererences**

Muhammad Hatta, *Politik Kebangsaan dan Ekonomi*, [Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2015], 393.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, [Yogyakarta: Paradigma, 2014], 4 - 5.

Sukarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Jakarta, Media Prassendo, 2016. Sulastomo, "Cita-cita Negara Pancasila", Jakarta, PT. KOMPAS Media Nusantara, 2014.

Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1987), Cet. Ke-2, 122

Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 28.

Swasono Sri-Edi, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1987. Wahid Abdurrahman, "Islamku, Islam Anda, Islam Kita", Jakarta, Projeck Demokrasi, 2011.

<http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/my%20Web/sembul//59.htm>

Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: Projeck Demokrasi, 2011), 183.

<https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pinus>

Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1998), 32-33.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/sistem-ekonomi-pancasila.html>

V.Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian* ( Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.57..